

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abu al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, trans. Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2020).

Widiyanto, A. E., & Syafaat, R. (2006). *Rekonstruksi Politik Hukum Pemerintahan Desa Dari Desa Terkooptasi dan marginal Menuju Desa Otonom dan Demokratik. Diterbitkan Atas Kerjasama SPOD FE Unibraw-Partnership For Government Reform, UNDP dan Uni Eropa, Jakarta.*

Silahuddin, M. Buku 1: *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.

Sjadzali, M., Nasution, H., & Madjid, N. (1990). *Islam dan tata negara: Ajaran sejarah dan pemikiran.*

Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.

Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.*

J. Suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996).

Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar Edisi Revisi.*

Eko, S. (2008). *Masa lalu, masa kini dan masa depan otonomi desa. IRE'S Insight, Workingpaper/11February.*

Indonesia, K. S. N. R. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22*

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60.

Indonesia, R. (2014). Undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. *Jakarta: Sekretariat Negara*.

desa, k., tertinggal, p. d., & indonesia, d. t. r. regulasi baru, desa baru.

Aswadi, S. P. (2025). Kemandirian Desa Berbasis Kearifan Lokal. *Transformasi Desa: Kemandirian, Inovasi, dan Pembangunan Berkelanjutan*, 17.

Departemen Agama, R. I. (2005). al-Qur'an dan Terjemahnya. *Bandung: Diponegoro*, 336.

Khaldun, I. (2011). Muqaddimah, terj. *Abdul al-Rahman*. *Jakarta: Pustaka al-Kausar*.

Indonesia, S. (2021). Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*.

Mutawalli, M. (2023). *Negara hukum kedaulatan dan demokrasi (konsepsi teori dan perkembangannya)*. Pustaka Aksara.

Nata, H. A. (2025). *Pemikiran para tokoh pendidikan Islam*. Amzah.

B. Jurnal Ilmiah

Muhammad Hamdan Khidir Bilyan dan Heriyanto, "Dinamika Hukum Pemerintahan Desa: Tinjauan Terhadap UU No. 6 Tahun 2014," *Jurnal Al- Mizan*, Vol. 11, No. 2 (2024).

Lindawaty, "Pembangunan Desa Pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa," *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, Vol. 14, No. 1 (2023).

Muhammad Mutawalli, Maskun, Muhammad Saleh Tajuddin, dan Abdul Rahman,

Hukum Otonomi Pemerintahan Daerah Dan Pemerintahan Desa Di Indonesia

(Makassar: Nas Media Pustaka, 2023).

Adnyana, I. G., & Dewi, C. I. D. L. (2022). Kedudukan desa dalam melaksanakan pemerintahan desa ditinjau dari sistem ketatanegaraan republik indonesia. *Jurnal Aktual Justice*, 7(1), 67-76.

Fanani, A. F., Astutik, W., Wahyono, D., & Suprpto, S. (2019). Analisis undang-undang Desa. *dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 4(1), 1-14.

Sjadzali, M., Nasution, H., & Madjid, N. (1990). Islam dan tata negara: Ajaran sejarah dan pemikiran.

Kusnadi, Y. (2021). Tinjauan Hukum terhadap Kedudukan Desa dalam Kerangka Otonomi Desa di Indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(4), 47-57.

Ridwan, S. K., Pinori, J. J., & Palilingan, T. N. (2023). Pembentukan peraturan desa dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. *Lex Administratum*, 11(4).

Bilyan, M. H. K. (2024). Dinamika Hukum Pemerintahan Desa:(Tinjauan Terhadap UU No. 6 Tahun 2014). *Jurnal Al-Mizan*, 11(2), 318-331.

Ibrahim, J. (2012). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cetakan ke-6. Malang: Bayumedia Publishing, 249-250.

Kurniawan, D. R., Irwandi, I., & Amin, M. (2023). Kedudukan Badan Pemusyawaratan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun). *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 3(1), 130-151.

Mukhlis, M. M., Maskun, M., Tajuddin, M. S., & Paidi, Z. (2024). Regional government according to the 1945 constitution: Ideas refinements and law reform. *Journal of*

Law and Legal Reform, 5(2), 495-530.

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Vol. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

Basuki, U. (2018). Negara Desa: Tinjauan Sosio-Yuridis Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Desa. *Jurnal Kajian Hukum*, 3(2), 549-578.

Gatot, R. Y. (2025). Transformasi Hukum Pemerintahan Desa: Perbandingan UU No. 5 Tahun 1979 dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. *TheJournalish: Social and Government*, 6(3), 273-282.

Sajangbati, Y. C. (2015). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Lex Administratum*, 3(2).

Manalu, E. F. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Dampak Kebijakan Pemerintah Pusat Pada Kemandirian Hukum Masyarakat Desa Lumban Binanga. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1750-1757.

Asrori, A. (2014). Kapasitas perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Kudus. *Jurnal Bina Praja*, 6(2), 101-116.

Kadri, W., & Tumadi, N. H. (2022). Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(II).

Bharata, W. S., Bakar, A., Sabry, M. S., Fajrin, S., & Rizal, R. (2023). Wawasan Al-Qur'an Tentang Musyawarah (Suatu Kajian Tematik). *Attractive: Innovative Education Journal*, 5(2), 479-493.

Aflaha, U., & Rahman, M. A. (2019). Telaah Kitab Fath Al-Mun'im Syarah Sahih Muslim Karya Musa Syahin Lasyin (Analisis Metode Kitab Syarah Hadis). *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, 11(2), 62-79.

Abu Ishaq asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 8-12.

Ibn Taymiyyah, *Al-Hisbah fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), hlm. 12-15.

Wilujeng, W. (2025). Good Governance Dalam Pemerintahan Indonesia: Analisis Normatif Berdasarkan Fikih Siyasah. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 10(2), 203-214.

Luthfy, R. M. (2021). Politik Hukum Pengaturan Peraturan Desa Dalam Produk Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 492.

C. Tesis dan Disertasi

SAQURO, M. A. (2025). *IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA DI DESA KOTO AMAN KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).

ILHAM, L. (2024). *ANALISIS PANDANGAN IMAM AL-MAWARDI TENTANG PENGANGKATAN MENTERI DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

SAQURO, M. A. (2025). *IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA DI DESA KOTO AMAN KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).

YULIA, N. (2025). *PEMBENTUKAN PERATURAN DESA YANG PARTISIPATIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN DEMOKRASI PANCASILA*.

D. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.